

Buruh Gendong dan Kesejahteraan: Strategi Yasanti Melawan Patriarki di Kalangan Pekerja Informal di Yogyakarta

Felisitas Friska Dianing Puspa¹

Diserahkan: 31 Mei 2022 | Diterima: 16 Juni 2023 | Diterbitkan: 28 Agustus 2023

Abstrak

Tulisan ini menganalisis upaya Yasanti, organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta, dalam meningkatkan pemberdayaan guna mereduksi budaya patriarki pada kelompok buruh gendong perempuan Pasar Beringharjo dalam konteks pandemi. Artikel ini menjawab pertanyaan bagaimana pandemi menghantam perekonomian buruh gendong perempuan, dimana terdapat penurunan upah akibat penutupan pasar. Juga minimnya proteksi yang diperoleh pekerja informal. Kajian ini menjadi penting untuk melihat realita pekerja informal di masa pandemi, khususnya buruh gendong perempuan di Pasar Beringharjo yang menjadi pusat ekonomi pariwisata Yogyakarta. Pasalnya, buruh gendong merupakan kelompok pekerja informal yang tidak memiliki proteksi sosial seperti jaminan upah standar, kesehatan, dan hari tua. Hal ini menghadirkan permasalahan ekonomi yang memengaruhi kesejahteraan hidup buruh gendong perempuan. Para buruh gendong ini juga berperan ganda, yakni menjalankan peran ekonomi dan memegang tanggung jawab atas urusan domestik (dapur, sumur, kasur). Paguyuban buruh gendong yang diinisiasi Yasanti menjadi penguat solidaritas untuk buruh gendong dalam menjaga kesejahteraan yang tidak didapat dari pemerintah. Pengkajian strategi Yasanti dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus untuk dapat memberi jawaban atas rumusan masalah. Penggalan data dilakukan melahui

1 Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: felisitas.friska@gmail.com.

wawancara dan studi literatur. Namun, penelitian ini memiliki limitasi hanya berfokus pada situasi buruh gendong di masa pandemi. Maka, kajian topik ini mampu menjadi pembuka bahasan secara lebih lanjut mengenai perlindungan kerja untuk kesejahteraan hidup pekerja informal. Pun soal manifestasi kesenjangan upah yang diperoleh kelompok buruh gendong Pasar Beringharjo di Yogyakarta di masa pandemi yang memiliki implikasi pada keberlangsungan hidup kelompok tersebut.

Kata kunci: *Yasanti, patriarki, buruh gendong perempuan, kesejahteraan, kesenjangan upah*

PENDAHULUAN

Kondisi pandemi telah memperparah kondisi ekonomi serta budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan buruh gendong perempuan Pasar Beringharjo di Yogyakarta. Dalam hal ini, situasi pandemi memberi dampak pada partisipasi pasar tenaga kerja perempuan yang memengaruhi pekerjaan rumah tangga mereka dimana distribusi pekerjaan domestik akan lebih ditanggung oleh perempuan (Bertocchi, 2020). Buruh gendong perempuan ini adalah pekerja yang bekerja memanggul bawaan pengunjung di pasar dan menerima upah dari jasa mereka. Selama pandemi, pendapatan mereka mengalami penurunan karena adanya kebijakan pembatasan kegiatan warga dan penutupan pasar. Sebelum pandemi, mereka bisa mendapatkan upah hingga Rp 50.000,00 sehari dan setelah pandemi, jika beruntung mereka hanya mendapat

Rp 30.000,00–Rp 40.000,00. Padahal, pendapatan buruh gendong menjadi salah satu pendukung ekonomi keluarga. Peran buruh gendong perempuan sebagai pendukung ekonomi ini bersamaan dengan peran mereka dalam urusan domestik. Seperti dalam studi *migration, gender, and care economy* bahwa perempuan pekerja informal ditempatkan dalam hierarki pasar tenaga kerja yang terfragmentasi, bergerak sebagai pencari nafkah juga pengurus urusan domestik (Rajan & Neetha, 2018). Hal ini ditunjukkan meski berperan sebagai pencari nafkah, buruh gendong perempuan masih menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga, yang menjadi penanggung jawab urusan domestik sehingga terjadi peran ganda. Peran ganda yang dijalani buruh gendong perempuan semakin mendomestikasi posisi mereka karena mereka tidak mampu menyampaikan pembagian peran di rumah bersama suaminya. Akhirnya, buruh gendong perempuan hanya bisa menerima inferioritasnya karena terbiasa dengan keadaan tersebut. Dalam konteks ini, Yasanti, sebuah organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta berupaya menguatkan peran perempuan yang terdomestikasi dengan cara memberikan pelatihan guna menjadikan buruh gendong perempuan sebagai perempuan yang berdaya atas haknya.

Topik ini menarik karena memperkaya kasus *double burden* yang dialami perempuan selama masa pandemi. Ditambah lagi, dalam perspektif ekonomi informal, topik ini memiliki *vulnerabilitas* yang tinggi, khususnya pengakuan peran buruh gendong perempuan dalam ranah publik. Oleh karenanya, bahasan mengenai upaya Yasanti dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan buruh gendong perempuan pasar Beringharjo menjadi bahasan yang menarik untuk dikaji. Salah satu hal yang menjadi latar belakang besar pemilihan topik ini adalah rendahnya kesejahteraan yang diterima buruh gendong perempuan dan masih adanya pembagian peran dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, topik ini akan membicarakan bagaimana Yasanti mengupayakan kesejahteraan buruh gendong perempuan Pasar Beringharjo yang menjadi kelompok dampingan atau binaannya. Hal tersebut meliputi pendampingan, advokasi, dan gerakan pemberdayaan yang dipilih dan diupayakan Yasanti dalam meningkatkan kesejahteraan buruh gendong perempuan Pasar Beringharjo, terutama di masa pandemi. Selain itu, topik ini juga akan mengulas tentang bagaimana pola kerja buruh gendong perempuan Pasar Beringharjo. Pola

kerja yang dimaksud dalam tulisan ini adalah keterlibatan buruh gendong perempuan serta jaminan kesejahteraannya sebagai tenaga kerja penggerak perekonomian informal di Yogyakarta.

Terlebih, sektor informal telah mendominasi ranah kerja di Indonesia. Data BPS merincikan pekerja informal di Indonesia hampir mencapai angka 80 juta orang.² Apabila dipersentasekan, perbandingan pekerja informal dan formal yakni 60% : 40%. Pekerjaan informal rata-rata diisi oleh kaum perempuan, dimana 60% perempuan masih menduduki posisi kerja informal (BPS, 2021) dan buruh gendong menjadi bagian dalam ranah kerja informal tersebut. Rupanya, persentase pekerja informal tersebut memengaruhi pola pembagian kerja dan perempuan menjadi susah memilih pekerjaan dengan tuntutan upah sesuai karena tidak memiliki keterampilan yang memadai. Seperti yang dialami Sumiyati, buruh gendong Pasar Beringharjo yang hanya diberi upah Rp 5.000,00 setelah mengangkut beban 50 kilogram (Nurhadi, 2020). Fenomena minimnya upah ini juga dipengaruhi oleh situasi pandemi yang merebak dua tahun

2 Membicarakan tenaga kerja, menurut UU No. 13 tahun 2003, tenaga kerja merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan (Thofir, 2021), baik dalam ranah formal maupun informal. Kerentanan buruh gendong perempuan bisa ditunjukkan melalui jumlah angkatan kerja di Indonesia dimana 83,13% nya masih didominasi oleh laki-laki (Komnas Perempuan, 2020).

belakangan. Banyak perempuan pekerja informal yang masih mengalami ketidakadilan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan karena regulasi yang ada hanya melindungi pekerja di ranah formal.

Berdasarkan situasi yang terjadi, Yasanti memiliki strategi untuk merespons segala kondisi yang ada, termasuk kerentanan perempuan pekerja informal. Strategi melalui pendampingan yang dilakukan menjadi respons atas manifestasi kesenjangan upah yang diperoleh kelompok buruh gendong Pasar Beringharjo di Yogyakarta di masa pandemi. Pemberdayaan yang terjadi turut menjadi hal yang digunakan Yasanti guna mereduksi budaya patriarki di masyarakat. Terlebih dalam situasi awal pandemi, buruh gendong perempuan semakin lekat dengan pekerjaan domestik karena pembatasan akses kerja di Pasar Beringharjo. Akhirnya, studi ini menjelaskan hubungan kausalitas tentang bagaimana patriarki memengaruhi pemenuhan kesejahteraan perempuan pekerja informal, khususnya dalam wujud domestikasi yang diterima buruh gendong perempuan Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan mampu mendorong pengadvokasian kebijakan guna memberi perlindungan kerja bagi perempuan pekerja informal, khususnya buruh gendong perempuan. Selain itu, penelitian ini diharapkan turut mengupayakan

terjadinya pencapaian pembagian peran secara semakin inklusif di masyarakat. Pengupayaan ini diharapkan mampu menjadi penggerak pemberian ruang bagi kelompok perempuan pekerja informal di Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini hendak menjawab pertanyaan, “Bagaimana upaya Yasanti dalam mereduksi budaya patriarki dan meningkatkan kesejahteraan kelompok buruh gendong perempuan Pasar Beringharjo?” Guna menjawab pertanyaan tersebut, metode yang digunakan di sini adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Metode ini dipilih karena dianggap mampu menerangkan fenomena yang terjadi secara lengkap dan menyeluruh (Creswell, 2013). Selain itu, metode kualitatif juga dapat memaparkan sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan data statistik atau angka. Mekanisme analisis dalam kajian ini dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, kemudian verifikasi data. Analisis data dalam kajian ini bersifat induktif dengan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Studi kasus yang diangkat mengerucut pada kehidupan buruh gendong perempuan Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Penggalan informasi dilakukan melalui studi literasi dan wawancara. Wawancara dilakukan di Yogyakarta dengan

enam narasumber yang meliputi dua narasumber dari Yasanti dan empat lainnya merupakan buruh gendong perempuan Pasar Beringharjo dalam rentang waktu November 2021 sampai Januari 2022 untuk memberikan beberapa informasi penting dalam tulisan ini. Selain itu, studi literatur melalui buku, jurnal, dan berita juga menjadi sumber sekunder yang digunakan untuk mendukung temuan yang diangkat dalam penulisan tulisan ini.

KERANGKA TEORI

Mengapa perempuan masih berada dalam posisi inferior? Pertanyaan ini menghubungkan pola kapitalisme dengan patriarki yang berjalan di masyarakat. Pemisahan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin menjadi mekanisme utama dalam masyarakat kapitalis yang masih mempertahankan superioritas laki-laki atas perempuan, karena upah yang didapat perempuan lebih rendah di pasar tenaga kerja (Hartmann, 1976). Kualifikasi tenaga kerja adalah konsep yang relatif dan biasanya didefinisikan menjadi dua, yang pertama, kecenderungan memaksimalkan keuntungan dan yang kedua, kecenderungan pekerja laki-laki untuk memperkuat keunggulan patriarki mereka terhadap pekerja perempuan (Kocabicak, 2013). Pada bahasan di sini, untuk membedah domestika perempuan di lingkup

publik dan keluarga, teori yang digunakan adalah teori patriarki dan pemberdayaan. Teori patriarki akan menjadi kacamata melihat ketidakmampuan buruh gendong menyuarkan haknya, sehingga terjadi domestikasi. Untuk itulah, teori pemberdayaan hadir sebagai *counter* guna meningkatkan pengakuan peran serta kesejahteraan hidup buruh gendong perempuan. Karena menjadi sangat berkaitan, kedua teori ini mampu membantu dan membedah persoalan yang terjadi di lapangan.

PATRIARKI: DOMESTIKASI PEKERJA INFORMAL

Kate Millet (1970) mendeskripsikan bahwa patriarki merupakan konsep yang mengacu pada kendali antara objek dan subjek. Begitu pula dalam buku *Patriarchal Theory Reconsidered: Torture and Gender-Based Violence in Turkey* yang memperkenalkan bahwa patriarki mengacu pada sistem, dimana kepala rumah tangga adalah laki-laki dan memiliki kekuatan hukum serta ekonomi yang mutlak atas anggota keluarga perempuan dan laki-laki yang menjadi tanggungannya (Akgul, 2017). Untuk memperkuat pemikirannya, Akgul (1970) meminjam pemikiran Butler, dimana patriarki merupakan sesuatu yang diproduksi dan direproduksi dalam konstruksi gender yang

memengaruhi kepribadian hingga akhirnya menghasilkan supremasi laki-laki. Pemikiran ini akhirnya berkembang dan melahirkan pembagian peran perempuan ke dalam ranah domestik dan subordinan, serta ranah publik dan dominan untuk laki-laki.

Dikotomi peran sebagai akibat pelanggaran patriarki selama ini telah memberi sekat ruang antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Laki-laki mendapat ruang sebebaskan-bebasnya di publik, sedangkan perempuan memiliki pengikat yang membuatnya dekat dengan urusan rumah (Abdullah, 2001, p. 105). Fenomena ini akan mengakar pada suatu pembagian kerja secara struktural yang membedakan wilayah kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan cenderung ter subordinasi karena memiliki bidang yang kurang penting dalam keseluruhan proses sosial (Abdullah, 2001, p. 105). Perempuan dianggap harus berkibrah dalam sektor domestik dan laki-laki lah yang layak mengisi sektor publik. Hal ini mengakibatkan pekerjaan yang dilakukan perempuan pekerja informal hanya sebagai kerja bayangan (*shadow work*) atau sebagai kerja “bawah permukaan” (Sofiani, 2010). Dengan demikian, pekerjaan yang dilakukan perempuan jarang dihargai dan dianggap tidak perlu mendapat penghargaan atau pengakuan. Padahal, tuntutan pengakuan partisipasi perempuan ini bukan sekadar

menuntut persamaan hak tetapi juga menyatakan fungsi perempuan dalam pembangunan masyarakat. Pun, telah banyak perempuan yang memberi partisipasi peran dalam sektor ekonomi dan sektor domestik sekaligus.

Dengan adanya peran ganda, pengakuan terhadap kontribusi kerja perempuan, khususnya perempuan pekerja informal masih saja rendah. Bahkan perempuan pekerja informal sulit memperoleh perlindungan hukum dan kesejahteraan secara umum. Dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 tertulis bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-Undang tersebut diturunkan ke dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-undang tersebut tertulis bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan memberi perlindungan tenaga kerja guna meningkatkan kesejahteraan. Namun kenyataannya, perempuan pekerja informal masih belum mendapatkan pengakuan dan jaminan perlindungan hukum seperti pekerja formal, yang dalam topik ini adalah buruh gendong perempuan (Sofiani, 2010). Melalui kerentanan tersebut dapat dikatakan bahwa kemunculan pasal perlindungan kerja selama ini dinilai hanya melindungi, menjamin pekerja formal, dimana pemberi kerja belum memberikan hak-hak terhadap perempuan pekerja

informal. Berdasarkan fenomena ini dapat dikatakan bahwa perempuan pekerja informal dianggap sebagai pekerjaan sampingan atau pelengkap struktur pekerja saja. Padahal seharusnya jika mengacu pada pasal yang ada, pemenuhan hak tidak mengacu pada jenis pekerjaan (formal atau informal). Pengakuan dan perlindungan kerja diperlukan bagi kelompok perempuan pekerja informal.

Pembagian kerja secara struktural sesungguhnya merupakan upaya yang membedakan wilayah kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Maka, perempuan cenderung ter subordinasi karena dianggap memiliki bidang yang kurang penting dalam keseluruhan proses sosial (Abdullah, 2001). Dalam buku *The Domestication of Women*, Barbara Rogers (1980) mengatakan bahwa domestikasi juga memengaruhi bagaimana relasi gender mengintervensi akses dan kontrol terhadap sumber daya dan budaya menjadi salah satu penentu peran gender. Susan Blackburn (2004) dalam *Women and The State in Modern Indonesia* turut menuliskan bahwa domestikasi dan diferensiasi perempuan sangat dipengaruhi oleh kultur yang berkembang dalam masyarakat dan di Indonesia, setiap kelompok etnis memiliki tradisi gendernya sendiri. Tak luput bahwa ideologi gender yang berkembang mengacu pada asumsi tentang gender yang menjadi dasar

tindakan dan cara negara berusaha memengaruhi konstruksi gender dalam masyarakat (Blackburn, 2004). Pelanggaran konstruksi patriarki yang dialami buruh gendong perempuan di sini terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Teori patriarki dalam tulisan ini berusaha menjelaskan kondisi dimana buruh gendong perempuan masih menerima inferioritasnya dalam urusan publik dan domestik. Memiliki upah yang tidak seberapa dan tidak mendapatkan perlindungan telah menjadikan buruh gendong perempuan sebagai kelompok rentan. Selain itu, meski buruh gendong perempuan telah bekerja menjadi penopang ekonomi keluarga di sektor informal, rupanya mereka tidak bisa lepas dari kerja domestik. Realita lapangan menunjukkan bahwa buruh gendong perempuan masih sulit mengomunikasikan pembagian peran dengan suaminya di rumah karena perbedaan strata atau kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pengkotak-kotakan ini terjadi dikarenakan budaya yang masih tertanam dan dilakukan oleh kelompok buruh gendong perempuan. Oleh karenanya, meski perempuan bekerja, perempuan tetap harus mengurus suami dan urusan domestik. Ketidakmampuan menyampaikan suara dan hak perempuan inilah yang menjadi latar belakang strategi dalam pemberdayaan Yasanti guna melawan patriarki di kalangan buruh gendong perempuan.

PEMBERDAYAAN SEBAGAI GERAKAN PERUBAHAN DENGAN PENDEKATAN BERBASIS KOMUNITAS

Keterbatasan pengakuan peran perempuan yang terjadi menunjukkan suatu gambaran dari kurangnya pemenuhan hak dan upah antara pemerintah dengan salah satu golongan masyarakatnya, yakni kelompok perempuan pekerja informal, khususnya dalam bahasan ini adalah buruh gendong perempuan. Fenomena ini dipengaruhi oleh *broken linkage* antara pemerintah yang kurang memberi payung hukum atas masalah kesejahteraan pekerja informal. Minimnya pengakuan peran dan perlindungan kerja terhadap perempuan pekerja informal menjadikan mereka menjadi tidak berdaya. Akhirnya, fenomena ini mendorong hadirnya suatu gerakan Yasanti yang memberdayakan secara kolektif untuk memberi kesejahteraan pada perempuan pekerja informal itu sendiri. Marni (2011) melihat pemberdayaan sebagai konsep pembangunan yang menekankan pada otonomi pengambilan keputusan dengan berlandaskan pada pemberian ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Pemberdayaan yang dimaksudkan adalah bagaimana komunitas dapat berkembang dan tumbuh di suatu negara, memiliki suatu pengalaman dan sifat-sifat yang dapat

menjawab permasalahan atau keterbatasan yang ada. Konsep pemberdayaan sendiri muncul dari dua premis mayor, yakni kegagalan dan harapan (Marni, 2011). Yasanti hadir menjadi kelompok yang memperjuangkan hak perempuan pekerja informal melalui kegiatan pemberdayaan, sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan buruh gendong perempuan, kelompok binaannya. Seperti semangat juang pemberdayaan yang dibawa Yasanti, yakni perempuan merdeka, perempuan berdaya.

Esensi gerakan sosial yang berwujud gerakan pemberdayaan bukan saja sebatas ekspresi dari dominasi tertentu melainkan merupakan sebuah bentuk keberpihakan (Kurniawan & Puspitosari, 2016). Dalam konteks ini, gerakan Yasanti hadir sebagai wujud pemberdayaan kelompok buruh gendong untuk menjadikan mereka sebagai perempuan merdeka dan berdaya. Pemberdayaan di sini dimaksudkan sebagai sesuatu yang meningkatkan taraf hidup seseorang atau kelompok (Weidenstedt, 2016). Pemberdayaan digunakan sebagai suatu pendekatan yang terjadi di masyarakat. Maka, hadirnya gerakan pemberdayaan sebagai respons korelatif dengan budaya patriarki sebagai ketahanan perempuan menjadi hal yang sah terjadi. Hal ini dikarenakan gerakan Yasanti hadir sebagai respons untuk pemberdayaan, pembebasan atas inferioritas perempuan

oleh laki-laki. Melalui ini, pemberdayaan digunakan sebagai istilah pada segala bantuan yang dilakukan Yasanti dalam meningkatkan kesejahteraan buruh gendong perempuan di Yogyakarta. Maka, gerakan pemberdayaan ini merupakan bentuk solidaritas, aksi kolektif dalam menunjukkan bentuk ketahanan dari masyarakat. Pergerakan komunal dengan menciptakan suatu komunitas atau kelompok dengan tujuan yang sama juga merupakan cara masyarakat memberi perlawanan. Kemudian, upaya memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki masyarakat menjadi hal yang mendasar dari agenda pemberdayaan. Oleh karenanya, pembentukan ruang gerak komunal untuk mengadvokasi atau mereduksi pelanggaran hak perempuan pekerja informal juga masuk ke dalam bentuk respons gerakan ini.

Weidenstedt (2016) berpendapat bahwa terdapat dua bentuk gerakan pemberdayaan yang berbeda. **Pertama**, pemberdayaan sebagai peningkatan kualitas kehidupan, yang biasanya ditemukan di tempat kerja, lingkup pekerja sosial, dan pemberdayaan komunitas. Bentuk ini biasanya terjadi pada kelompok A yang ingin memberdayakan kelompok lain-kelompok B, mendapat dorongan dari luar. **Kedua**, pemberdayaan berupa gerakan sosial dengan bentuk *self improvement* atau dorongan dari dalam. Perbedaan

kedua bentuk pemberdayaan ini menjadi penting karena menggambarkan hubungan atau transfer kekuasaan antara pihak yang memberdayakan dan diberdayakan. Pada artikel ini, fokus kajian pemberdayaan yang digunakan Yasanti adalah peningkatan kualitas kehidupan buruh gendong perempuan melalui dorongan dari dalam dan luar sekaligus.

Dalam buku negara, *civil society* dan demokratisasi (Kurniawan & Puspitosari, 2016, p 89), terdapat tiga agenda perubahan yang hendak dicapai dalam suatu gerakan, yakni:

1. Adanya perubahan politik, yaitu mengembalikan kekuasaan pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan melalui mekanisme demokrasi agar melahirkan pemerintahan yang representatif, aspiratif, demokratis, dan berkualitas.
2. Adanya perubahan ekonomi dengan memperkuat basis-basis perekonomian rakyat dengan jalan memperjuangkan struktur ekonomi keadilan.
3. Adanya perubahan sosial-budaya dengan memperjuangkan penghapusan nilai-nilai feodalisme dan paternalistik serta membangun budaya egaliter, demokratis, dan humanis.

Berdasarkan tiga agenda ini, Yasanti berfokus dalam peningkatan nilai demokratis bagi buruh gendong dalam menyampaikan kebutuhannya serta meningkatkan kondisi perekonomian rumah tangga mereka. Meski secara total tidak mencapai tiga agenda sesuai dasar gerakan sosial yang ada, Yasanti tetap mencapai tiga perubahan sesuai indikator kebutuhan buruh gendong perempuan.

Dengan dasar persamaan nasib dan kondisi, gerakan pemberdayaan ini mendorong terbentuknya komunitas atau paguyuban, apalagi untuk mencukupi kesejahteraan hidup mereka di era pandemi. Solidaritas menjadi ciri utama pemberdayaan ini, dimana solidaritas memiliki komitmen kolektif dalam menciptakan komunitas (Delanty, 2018). Pendekatan komunitas sebagai hasil dari pergerakan komunal ini sejalan dengan konsep Victor Turner yang dikutip Delanty (2018), dimana suatu gerakan hadir sebagai emosi komunal spontan. Selain itu, pemberdayaan komunitas yang terjadi menunjukkan adanya kekecewaan yang mendalam pada pemerintah sebab tidak dapat dijangkau melalui pendekatan *top down*. Pergerakan Yasanti dalam mengadvokasi hak-hak buruh gendong perempuan menjadi contoh dari emosi komunal yang spontan. Yasanti melihat pada bagaimana menumbuhkan keberdayaan buruh gendong perempuan dalam memperbaiki kualitas hidup mereka. Pengomunikasian

tindakan yang tidak hanya mementingkan diri sendiri menjadi topik pemberdayaan yang dibawa di sini. Mereka bergerak dengan diawali oleh kesadaran secara spontan atas dasar solidaritas isu yang sama.

Berkaca pada teori pemberdayaan yang mendorong tingkat kesejahteraan hidup suatu kelompok, Yasanti memiliki strategi penguatan guna mencapai buruh gendong yang mandiri. Strategi penguatan di ranah publik yang telah dilakukan dan masih diperjuangkan yakni advokasi hak buruh gendong perempuan. Advokasi ini menjadi sarana perlindungan dan tunjangan pada area kerja informal yang diterima oleh perempuan di Pasar Beringharjo. Di samping itu, terdapat penguatan individu berupa komunikasi media massa, keterampilan (membatik, sosial media, dsb) guna mencapai ekonomi mandiri, dan transfer *knowledge* tentang hak perempuan di rumah. Meski begitu, pemberdayaan yang dilakukan Yasanti memiliki limitasi pada batas tersebut karena banyak pihak yang belum terbuka atas isu tersebut.

PEMBAHASAN

Bagian ini akan membahas upaya Yasanti bergerak dalam memperjuangkan salah satu kelompok binaan di bawahnya. Selain itu, bahasan di sini juga mengangkat bagaimana

patriarki kemudian direduksi melalui program yang diusung Yasanti. Pembahasan ini dibagi menjadi pergerakan Yasanti dan pergerakan Yasanti dalam mengupayakan kesejahteraan buruh gendong perempuan Pasar Beringharjo.

YASANTI DAN UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEKERJA INFORMAL

Yasanti merupakan suatu organisasi yang memiliki fokus pada peningkatan kondisi dan aspirasi perempuan (baik secara formal maupun sosiokultural) di masyarakat melalui pembentukan organisasi pekerja serta advokasi dan bertempat di Yogyakarta. Dengan tujuan membantu perempuan, khususnya buruh perempuan, Yasanti memiliki arti tersendiri, Annisa berarti perempuan dan Swasti berarti mandiri (Istiatun & Khasanah, 2011). Berdiri sejak 28 September 1982, Yasanti telah tercatat sebagai badan hukum dengan akte notaris dari Umar Syambudi, SH. Nomor 52/28 September 1982 dan terdaftar di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 25 November 1982 dengan nomor 183/82/4. Yasanti bergerak dengan mengangkat isu pekerja dengan pendekatan *lobbying*, publikasi melalui sosial media dan berbagai poster, kampanye, dan *networking* dengan NGO (*Non-Government Organization*), serta Lembaga riset lainnya. Pemberdayaan perempuan pekerja yang dilakukan

Yasanti salah satunya meliputi perempuan pekerja informal seperti buruh perempuan. Dalam lanskap pandemi, Yasanti bergerak bersama dengan komunitas atau lembaga lain dalam pemenuhan kebutuhan buruh perempuan binaannya.

Menilik dari akte kelahiran Yasanti, dalam mencapai maksud dan tujuannya, Yasanti banyak melakukan kegiatan-kegiatan, seperti (1) pendidikan, yang di dalamnya berisi latihan serta berbagai upaya untuk pengembangan swadaya dan swakarsa perempuan terutama di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kesehatan, lingkungan, dan lainnya, (2) bekerja sama dengan pihak atau lembaga lain yang mampu mendukung visi misi, tujuan pergerakan Yasanti, (3) usaha lain yang meliputi kegiatan pemberdayaan pengorganisasian perempuan kelas bawah (Istiatun & Khasanah, 2011). Buruh gendong perempuan Pasar Beringharjo atau biasa disebut dengan endong-endong menjadi salah satu binaan dampingan Yasanti. Melalui paguyuban ini, Yasanti mampu mengadakan pendampingan, pelatihan, pendidikan untuk tujuan pemberdayaan, perempuan berdaya.

Pendampingan buruh gendong perempuan Pasar Beringharjo yang dilakukan Yasanti telah dilakukan sejak tahun 1994 dan didasari penelitian pada tahun 1987. Pemilihan Pasar Beringharjo ini lantaran pasar ini telah

menjadi pasar tertua serta pusat ekonomi pariwisata Yogyakarta. Dalam perjalanannya, Yasanti menjadi kelompok pioner yang progresif dalam melakukan pendampingan terhadap buruh gendong perempuan. Sejauh ini terdapat pelatihan yang beragam, seperti pelatihan kepemimpinan, pelatihan *eco print*, hingga pelatihan penggunaan media sosial seperti instagram. Pelatihan yang dilakukan Yasanti membawa prinsip berasal dari perempuan dan berkarya untuk perempuan.

“Bantuan binaan yang diberikan Yasanti ini dilakukan lantaran buruh gendong perempuan menanggung berat yang mengganggu kesehatan mereka. Belum lagi upah yang diperoleh buruh gendong perempuan cenderung minim dan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya secara penuh.” (A, Direktur Yasanti, Wawancara Pribadi, 10 November 2021)

Pernyataan tersebut disebabkan beban kerja, risiko, serta upah yang diterima buruh gendong perempuan cenderung tidak sepadan. Upah yang didapat buruh gendong per harinya hanya Rp 30.000,00–Rp 40.000,00, dan mereka tidak menggondong setiap hari. Apabila dibandingkan dengan UMR Yogyakarta Tahun 2022 sebesar Rp 1.840.915,00, upah buruh gendong perempuan tidak sampai setengahnya. Tekanan kerja fisik dengan menggondong dagangan

puluhan kilo dengan upah yang sangat minim menjadikan kesejahteraan hidup buruh gendong perempuan sangat terganggu. Melalui temuan lapangan ini, Yasanti akhirnya terdorong untuk melakukan pemberdayaan melalui program yang dirancang untuk buruh gendong perempuan Pasar Beringharjo (Istiatun & Khasanah, 2011). Bermula dari 20–30 anggota, paguyuban buruh gendong perempuan yang terbentuk sebagai wadah pemberdayaan sekarang telah mencapai 208–218 orang di seluruh pasar di Yogyakarta. Paguyuban bentukan buruh gendong perempuan ini dinamai dengan “Sayuk Rukun” dengan dasar membangun kebersamaan dan solidaritas. Hal ini sejalan dengan tujuan pendirian Yasanti seperti mengembangkan aspirasi dan potensi kaum perempuan dalam mengembangkan nilai-nilai kemajuan serta kesejahteraan bangsa dan negara, mengembangkan sumber daya manusia dan masyarakat, khususnya perempuan (Istiatun & Khasanah, 2011).

Berkaca dari konsep pemberdayaan sebagai suatu untuk meningkatkan taraf hidup seseorang, Yasanti menjadi manifestasi peningkatan taraf hidup melalui penguatan personal buruh gendong perempuan. Pendampingan dengan komunikasi dan *monitoring* secara rutin menjadi program pergerakan Yasanti dalam mengupayakan kepercayaan bersama buruh gendong perempuan Pasar Beringharjo.

“Saya setiap harinya kan ke pasar, nah pemberdayaan yang dilakukan itu berupa penguatan personal, penguatan lebih ditekankan dalam pendampingan buruh gendong perempuan, karena kalau personalnya sudah kuat, organisasinya bisa kuat. Untuk buruh gendong perempuan paling tidak kita kuatkan personalnya dahulu karena pendidikan mereka berbeda-beda.” (B, pengurus Yasanti, Wawancara Pribadi, 15 November 2021)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Yasanti terjalin secara rutin melalui komunikasi langsung berupa kunjungan ke pasar dengan fokus penguatan personal buruh gendong perempuan. Latar belakang pendidikan yang berbeda-beda membuat Yasanti menasar pada penguatan personal buruh gendong perempuan Pasar Beringharjo. Selain pengecekan kondisi dengan kunjungan setiap hari, terdapat juga pertemuan rutin dengan anggota paguyuban buruh gendong yang terjalin setiap bulannya.

Program usungan Yasanti ini terdorong atas realita lapangan dimana selama pandemi, aktivitas dan pendapatan buruh gendong mengalami penurunan. Pembatasan gerak yang menuntut buruh gendong lebih banyak di rumah tanpa memiliki pemasukan tambahan menempatkan mereka sebagai kelompok rentan ekonomi. Di samping masalah

pendapatan dan ruang geraknya, kehidupan domestik menjadikan buruh gendong semakin mengalami kerentanan. Hal ini ditujukan pada ketidakmampuan mereka melakukan pembagian peran dan haknya di rumah. Menopang kebutuhan ekonomi, buruh gendong juga masih bertanggung jawab atas urusan domestik dan memiliki pandangan bahwa perempuan menjadi kelompok yang melayani laki-laki sesuai dengan budaya patriarki yang mereka jalankan selama ini. Fenomena ini sejalan dengan teori Susan Blackburn (2004) dalam *Women and The State in Modern Indonesia* dimana domestikasi yang berkembang dipengaruhi oleh kultur budaya masyarakat. Temuan berupa kerentanan ganda inilah yang mendorong Yasanti melakukan pemberdayaan bagi buruh gendong perempuan Pasar Beringharjo.

Melalui konsep pemberdayaannya, upaya Yasanti untuk mereduksi patriarki fokus pada penguatan kapasitas individu buruh gendong perempuan melalui pendampingan dan pelatihan. Penguatan konsep perempuan berdaya, merdeka, dan kuat menjadi upaya mereduksi patriarki yang dilakukan Yasanti. Reduksi patriarki di sini menekankan pada konsep bahwa perempuan mampu berdaya atas dirinya sendiri dan menyuarkan apa yang dikehendaknya, tidak terpaksa atas konstruksi yang ada dalam masyarakat, perempuan bisa mandiri dan merdeka. Salah satu dampak penguatan

yang hadir dari program pemberdayaan adalah munculnya pembagian peran melalui komunikasi yang dilakukan buruh gendong kepada suaminya di rumah. Pelatihan kepemimpinan yang difokuskan untuk membuat buruh gendong sebagai perempuan yang berdaya dan mengetahui kemauannya menjadi salah satu tujuan dari pemberdayaan ini.

*“Sekarang saya bisa lebih berkomunikasi dengan suami, kalau dulu kan masih gimana gitu ya, bukan karena takut. Setelah ada pelatihan-pelatihan seperti pelatihan kepemimpinan dari Yasanti, saya jadi bisa ngomong sama suami dalam pembagian kerja di rumah, saling berbagi tugas sama suami. Dahulunya, sebelum pelatihan, semua dikerjakan saya sendiri.”
(C, Wawancara Pribadi, 10 Januari 2022)*

Hal ini menjelaskan bahwa kesadaran atas peran yang dilakukan bisa menjadi sarana reduksi patriarki yang terjalin dalam pembagian kerja pada keluarga. Perempuan berdaya di sini ditekankan Yasanti pada penentuan apa yang ingin dilakukan sebagai seorang individu. Pelaksanaan pelatihan pemberdayaan ini terjadi lantaran buruh gendong perempuan masih sering menerima inferioritas, domestikasi peran, yang secara tidak sadar merasa di bawah kendali laki-laki (Beauvoir, 1989).

Meski kehadiran Yasanti telah membantu penguatan kapasitas individual buruh gendong perempuan melalui paguyuban yang ada, hal ini justru bisa menjadikan pemerintah merasa bahwa masyarakat mampu mencukupi kebutuhan yang tidak bisa dihadirkan pemerintah. Belum adanya jaminan sosial atau regulasi perlindungan untuk kelompok buruh gendong perempuan, juga pengajuan regulasi toilet gratis yang dibatasi jumlahnya hanya sebanyak enam tempat menjadi bentuk minimnya kehadiran pemerintah. Beban bayar Rp 2.000,00 setiap menggunakan toilet (Wancoko, 2021) menjadi hal yang cukup membebani, apalagi buruh gendong bisa menggunakan toilet lebih dari satu kali. Dengan pembatasan akses toilet gratis, upah yang diterima buruh gendong semakin terkikis, ditambah tidak adanya standar tarif buruh gendong.

“Kami mengusahakan pemenuhan kebutuhan ya karena pemerintah tidak mengeluarkan regulasi yang jelas. Kasihan gitu mbak, hidupnya berat, jaminan upah, perlindungan kerja juga tidak ada. Kami mengajukan banding penyediaan toilet gratis, tetapi yang berhasil goal hanya 6 toilet saja. Paling ya bantuan berupa BPJS itu, tapi kan BPJS kan aturannya seperti itu ya mbak, harus membayar juga.” (B, pengurus Yasanti, Wawancara Pribadi, 15 November 2021)

Pemenuhan kesejahteraan yang dilakukan secara *bottom up* bersama pemerintah ini menjadi bentuk belum sejalanannya tujuan kerja pemerintah dengan kebutuhan masyarakatnya karena belum mencapai tujuan sesuai kebutuhan.

YASANTI DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BURUH GENDONG PEREMPUAN PASAR BERINGHARJO

Pandangan interaktif dengan mengarah pada pemberdayaan melihat pada bagaimana menumbuhkan keberdayaan masyarakat dalam memperbaiki kualitas hidup mereka. Kondisi pandemi yang memengaruhi perekonomian hingga berdampak pada kesejahteraan hidup buruh gendong perempuan menjadi fokus pemberdayaan Yasanti. Selain melihat pada isu keberdayaan, pemberdayaan masyarakat memerlukan suatu agenda yang terlaksana secara kontinu. Di tengah masa pandemi ini, pemberdayaan sering kali terbatas pada ruang gerak yang sempit serta penyediaan sumber daya yang terbatas. Hulme dan Turner menggunakan strategi *the welfare approach* yang mengarah pada pendekatan manusia untuk memperkuat keberdayaan masyarakat dengan dilatarbelakangi kekuatan masyarakat itu sendiri (Marni, 2011). Melalui konsepsi ini, kehadiran Yasanti menjadi salah satu gambaran gerakan pemberdayaan yang

bergerak untuk memperbaiki struktur yang dijalankan oleh kelompok buruh gendong perempuan Pasar Beringharjo. Pelatihan kepemimpinan, cara menggunakan media sosial, pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan membuat, pertemuan rutin, simpan pinjam, dan banyak lainnya menjadi upaya yang dibawa Yasanti. Selain itu, menumbuhkan kesadaran individu atau *internal motivation* menjadi salah satu tujuan pemberdayaan yang dilakukan Yasanti.

Dengan partisipasi plural, Yasanti menjadi perwujudan suatu gerakan pemberdayaan sebagai penguatan di masyarakat yang melibatkan intimasi pada ruang gerak yang tidak terpaku pada satu struktur. Konsep pemberdayaan tersebut mampu menjadi dasar pergerakan Yasanti dalam mereduksi patriarki yang bekerja dalam ruang buruh gendong perempuan Pasar Beringharjo di Yogyakarta. Selain itu, kehadiran gerakan komunal ini turut memberi gambaran bahwa terdapat ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan ketidakpuasan masyarakat dengan kebijakan yang ada. Dalam bahasan ini, struktur upah dan perlindungan pengakuan kerja buruh gendong perempuanlah yang belum bisa dipenuhi oleh pemerintah. Maka, Yasanti hadir sebagai lembaga yang mengisi *broken linkage* antar pemerintah dan buruh gendong perempuan.

Tuntutan peningkatan kesejahteraan, minimnya struktur upah, kurangnya peralatan keselamatan kerja, dan pengakuan perempuan pekerja informal melalui pemberdayaan Yasanti ini dapat juga dikatakan sebagai akibat dari perampasan ruang yang dialami buruh gendong perempuan.

“Kami ini ya upahnya nggak bisa ditentukan, sebelum pandemi nggendong 50 kilogram dapat upahnya Rp 5.000,00. Satu hari bisa Rp 50.000,00. Sekarang setelah pandemi ini sehari dapat Rp 30.000,00–Rp 40.000,00 saja juga sudah bersyukur. Perlindungan kerja dan bantuan juga tidak ada.” (D, Wawancara Pribadi, 10 Januari 2022)

Fenomena perampasan kesejahteraan melalui minimnya struktur upah, terutama dalam kehidupan di masa pandemi ini memicu gerakan yang menguatkan atau biasa dikenal sebagai resistensi kelompok. Hal ini menjadi bentuk pemberdayaan yang terjadi dengan semangat dari dalam. Hadirnya pemberdayaan melalui Yasanti mampu menjadi pembuka ruang penyaluran kebutuhan atau aspirasi buruh gendong perempuan untuk mereduksi pengakuan kerja mereka secara lebih luas.

Pergerakan yang dilakukan dapat dikatakan sejalan dengan gerakan Yasanti yang dalam relasi ini mereduksi penempatan perempuan di bawah superioritas laki-laki. Pergerakan ini mengharapkan perbaikan akan marginalisasi

perempuan dalam berbagai bidang kehidupan serta sosialisasi penerimaan posisi perempuan pekerja informal menjadi lebih baik lagi (Fakih, 2008). Dengan basis teori dan *framework* pemikiran yang ada, pergerakan Yasanti dapat diklasifikasikan sebagai gerakan yang berjalan dengan basis isu peningkatan keadilan bagi perempuan, khususnya buruh gendong perempuan di Yogyakarta. Apalagi, buruh gendong merupakan pekerjaan yang berat dan rawan mengganggu kesehatan, seperti sakit tulang, osteoporosis, dan sebagainya. Karena ranah pekerjaan fisik ini biasanya dilakukan laki-laki, maka buruh gendong perempuan sering kali mendapat perlakuan tidak adil. Kondisi ini akhirnya mendorong Yasanti memperluas pemberdayaan perempuan dengan melakukan program untuk buruh gendong.

Gerakan pemberdayaan yang terjadi umumnya berlangsung melalui paguyuban buruh gendong yang dibentuk oleh Yasanti dalam pengorganisasian kebutuhan buruh gendong perempuan di Pasar Beringharjo.

“Meski memiliki kondisi yang pas-pasan atau bahkan bisa dikatakan kurang, namun terkadang yang buruh gendong butuhkan itu hanyalah didengarkan ketika menceritakan kesusahannya. Makanya, fungsi paguyuban buruh gendong bisa dimaksimalkan di

situ. Sering kali saya ke pasar untuk mendengar keluhan mereka. Sayangnya pandemi membuat banyak hal yang sudah dibangun terdegradasi.” (B, pengurus Yasanti, Wawancara Pribadi, 15 November 2021)

Melalui ini, Yasanti telah memberi gambaran solidaritas sesuai dengan teori Delanty (2018), dimana solidaritas dan kesamaan nasib atau latar belakang menjadi alasan utama pembentukan paguyuban buruh gendong tampak dalam fungsi kehadiran komunitas tersebut. Sayangnya, kondisi pandemi dalam dua tahun terakhir menjadikan solidaritas yang terbentuk menjadi terdegradasi dengan cukup signifikan. Solidaritas buruh gendong yang terbiasa melakukan bongkar muatan secara bersamaan menjadi terkikis karena sempat terjadi penutupan pasar di masa pandemi. Akibatnya, penguatan kapasitas individu kelompok paguyuban menjadi suatu hal yang perlu ditingkatkan kembali guna menjaga solidaritas kelompok dalam pergerakan sosial.

Salah satu penguatan yang masih dirasa kelompok buruh gendong perempuan kurang tercapai adalah penguatan upah. Maka, untuk meringankan beban upah yang diterima buruh gendong perempuan, Yasanti melakukan pertemuan rutin dengan berbagai advokasi program di dalamnya.

*“Ya gabung ke dalam paguyuban itu kan banyak manfaatnya mbak, seandainya butuh apa kita bisa ke paguyuban, kalau pas ada acara kita bisa pinjam uang, terus nanti kembalinya kan bisa diangsur gitu. Bisa dikatakan sangat membantu, meringankan.”
(E, Wawancara Pribadi, 10 Januari 2022)*

Melalui pernyataan tersebut, didapati bahwa paguyuban bentukan Yasanti telah meringankan beban upah yang diterima oleh buruh gendong perempuan. Selain itu, banyak terjadi pelatihan yang bisa diikuti buruh gendong perempuan guna meningkatkan kapasitas persona individu mereka.

“Saya jadi tahu manfaat organisasi itu apa, ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan juga, lalu setiap tanggal 10 juga ada pertemuan rutin, ada simpan pinjam.” (F, Wawancara Pribadi, 10 Januari 2022)

Selain menghadirkan simpan pinjam sebagai peringan beban upah yang diterima buruh gendong perempuan, Yasanti turut menghadirkan advokasi program lainnya. Penyediaan fasilitas toilet gratis menjadi salah satu cara yang diupayakan Yasanti guna meringankan ekonomi buruh gendong perempuan di masa pandemi.

“Untuk program-program yang telah Yasanti lakukan selama masa pandemi yang jelas itu penyediaan toilet gratis, tapi karena pemerintah tidak memberi

kebijakan yang tegas jadi menurut SK toilet gratis hanya ada 5 toilet saja. Selain itu, ada pemeriksaan kesehatan juga.” (B, pengurus Yasanti, Wawancara Pribadi, 15 November 2021)

Dari sini dapat kita lihat bahwa Yasanti telah mengupayakan berbagai program guna meningkatkan kesejahteraan hidup buruh gendong perempuan Pasar Beringharjo. Strategi ini menjalankan tujuan pemberdayaan dalam meningkatkan taraf hidup individu (Marni, 2011). Penyediaan wadah aspirasi kebutuhan, usaha bersama simpan pinjam, pendampingan melalui pertemuan rutin sebagai penguat internal paguyuban, pelatihan guna meningkatkan persona individu, hingga advokasi kebijakan telah diupayakan Yasanti sebagai lembaga pemerhati buruh gendong perempuan, yang salah satunya terletak di Pasar Beringharjo.

Buruh gendong perempuan sebagai bentuk kerja informal mengalami pola relasi yang dibangun di bawah naungan kaum kapitalis yang memiliki ideologi patriarki (Sofiani, 2010). Bentuk kerja informal merupakan instrumen kerja vertikal antara atasan dan bawahan sehingga tidak memerlukan mitra untuk berkembang. Dengan adanya konsep ini, perempuan masih dianggap sebagai *the second sex* (Beauvoir, 1989),

dimana apa yang dikerjakannya tetap dinilai lebih rendah daripada laki-laki. Pada akhirnya, fenomena ini cukup menjelaskan bahwa eksistensi buruh gendong perempuan merupakan realitas yang masih terabaikan.

“Dari kesejahteraan, kami buruh gendong perempuan ini kan perlu diberi perlindungan kerja dan pengakuan sebagai buruh informal, tidak diabaikan begitu saja. Kebijakan yang ada semoga lebih adil dengan perempuan dan masyarakat kecil.” (E, Wawancara Pribadi, 10 Januari 2022)

Pernyataan tersebut jelas masih menunjukkan minimnya pengakuan dan perlindungan terhadap buruh gendong perempuan. Kondisi ini menjadikan mereka bergerak bersama secara komunal untuk memenuhi dan mendapatkan kebutuhan yang tidak didapat dari pemerintah.

Fenomena marjinalisasi buruh perempuan mendorong Yasanti untuk membantu buruh gendong perempuan keluar dari keterpurukan mereka. Kehadiran Yasanti sebagai gerakan sosial juga diharapkan mampu membuat perempuan semakin merdeka atas dirinya. Hal ini dimaksudkan sebagai pendorong perempuan untuk bisa memilih, menentukan apa yang hendak ia lakukan, terkhusus dalam hal sosial, ekonomi, dan politik. Politik di sini bukan berarti harus terjun dalam dunia politik, melainkan bagaimana

cara perempuan memperjuangkan hak asasi mereka. Namun, sehubungan dengan beragamnya tingkat pendidikan yang dimiliki buruh gendong perempuan, menjadikan Yasanti perlu memfokuskan diri dalam penguatan individu setiap buruh gendong perempuan di Pasar Beringharjo terlebih dahulu. Melalui pendampingan dan peningkatan kapasitas individu, buruh gendong perempuan menjadi mengetahui hak atas kemerdekaannya dan akhirnya bisa keluar dari inferioritasnya.

KESIMPULAN

Masalah kesejahteraan, pengakuan kerja, serta perlindungan hukum perempuan pekerja informal, khususnya buruh gendong perempuan menjadi masalah utama dalam tulisan ini. Ditambah masa pandemi yang tidak tetap ini sangat memberi dampak pada kehidupan ekonomi hingga kesejahteraan buruh gendong perempuan Pasar Beringharjo. Sebagai bagian dari penggerak perekonomian, khususnya tulang punggung keluarga, buruh gendong perempuan masih harus menghadapi beban ganda di rumah. Guna mencapai kesejahteraan atas peran yang dihadapi buruh gendong perempuan tersebut, Yasanti memiliki strategi

pemberdayaan melalui program-programnya. Pelatihan kepemimpinan yang dibawa Yasanti mampu menjadikan buruh gendong perempuan memiliki pemegang peran atas dirinya sendiri.

Pemberdayaan melalui pengajaran yang dilakukan Yasanti setidaknya telah membuat buruh gendong perempuan semakin menyadari hak mereka sebagai perempuan. Dampak pemberdayaan Yasanti didasari oleh pengulangan yang menjadi kunci dari pemberdayaan Yasanti sehingga program yang dibawa dilakukan secara berkelanjutan. Melakukan komunikasi secara *bottom up* dengan pemerintah guna memberi kesejahteraan atas buruh gendong perempuan di masa pandemi juga sempat dilakukan Yasanti. Komitmen yang dijalankan Yasanti ini sejalan dengan nilai-nilai gerakan yang mencakup peningkatan kondisi dan aspirasi perempuan (baik secara formal maupun sosiokultural) di masyarakat melalui pembentukan organisasi atau paguyuban pekerja serta advokasi. Meski memiliki limitasi hanya berfokus pada situasi di masa pandemi, temuan yang ada ini diharapkan mampu membantu perpanjangan tangan perjuangan hak perempuan informal yang dilakukan oleh Yasanti. Selain sebagai sumber informasi, tulisan ini memiliki

kontribusi sebagai kritik pemenuhan kesejahteraan pekerja informal dan bisa digunakan sebagai rekomendasi untuk melanjutkan perumusan perlindungan bagi buruh gendong perempuan.

REFERENSI

Jurnal

- Atmojo, B. T., & Safara, Y. A. (2021). Gerakan Sosial Baru (Studi Kasus Aksi Kamisan di Jakarta). *Forum Ilmu Sosial* 48, 46–57.
- Hartmann, H. (1976). Capitalism, Patriarchy, and Job Segregation by Sex. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 1 (3, Part 2), 137–169. <https://doi.org/10.1086/493283>.
- Hidayati, Nurul. (2015). “Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)”. *Muwazah*. 7 (4): 645–66.
- Kocabicak, E. (2013). The Relationship of Patriarchy and Capitalism: The “Win-Win” Scenario Reconsidered. *Kadın Araştırmaları Dergisi* 193–214.
- Marni, K. D. (2011). Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Demokrasi*, 14.
- Prasisko, Y. G. (2016). Gerakan Sosial Baru Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 3.
- Rahayu, A. W. (2015). Perempuan dan Belenggu Peran Kultural. *Jurnal Perempuan, Patriarki*. <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/perempuan-dan-belenggu-peran-kultural>.
- Rajan, S. I., & Neetha, N. (2018). Migration, gender and care economy. In *Migration, Gender and Care Economy*. <https://doi.org/10.4324/9780429426704>.

- Sofiani, Triana. 2010. "Eksistensi Perempuan Pekerja Rumah Tangga dalam Konstelasi Relasi Gender." *Eksistensi Perempuan Pekerja Rumah Tangga dalam Konstelasi Relasi Gender 2* (1): 197–203.
- Suharko. (2006). Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Reportoer Gerakan Petani. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Thofir, N. (2021). Komparasi Buruh Gendong di Pasar Beringharjo dan Giwangan Yogyakarta. *POPULIKA*, Vol. 9 No. 1.
- Weidenstedt, L. (2016). Empowerment Gone Bad. *Socius: Sociological Research for a Dynamic World*, 2. <https://doi.org/10.1177/2378023116672869>.

Buku

- Abdullah, Irwan. (2001). *Seks, Gender Dan Reproduksi Kekuasaan*. Yogyakarta: Tarawang Press.
- Akgul, Filiz. (2017). *Patriarchal Theory Reconsidered: Torture and Gender-Based Violence in Turkey*. London: Palgrave Macmillan.
- Beauvoir, S. D. (1989). *The Second Sex: Women's Life Today*. New York: Vintage.
- Blackburn, Susan. (2004). *Women and The State in Modern Indonesia*. New York: Cambridge University Press.

Creswell, J. W. (2013). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches* (p. 273). Canada: Canadian Center of Science and Education.

Delanty, G. (2018). *Community*. New York: Routledge.

Fakih, M. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Istiatun, & Khasanah, T. I. (2011). *Perlawanan Buruh Perempuan*. Yogyakarta: Yasanti.

Kurniawan, L. J., & Puspitosari, H. (2016). *Negara, Civil Society dan Demokratisasi*, (R. Jannah (ed.)).

Millet, K. (1970). *Sexual Politics*. New York: University of Illinois Press.

Mirsel, R. (2004). *Teori Pergerakan Sosial*. Yogyakarta: Resist Book.

Rokhmansyah, Alfian. (2016). *Pengantar Gender Dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca.

Wawancara Pribadi:

A, Direktur Yasanti. (2021). Wawancara Pribadi: 10 November 2021. Pasar Beringharjo.

B, Pengurus Yasanti. (2021). Wawancara Pribadi: 15 November 2021. Pasar Beringharjo.

C. (2022). Wawancara Pribadi: 10 Januari 2022. Pasar Beringharjo.

Dokumen lain

Bertocchi, G. (2020). *COVID-19 Susceptibility, Women, and Work*. <https://voxeu.org/article/covid-19-susceptibility-women-and-work>.

BPS. (2021). Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2019–2021. *bps.go.id*. <https://www.bps.go.id/indicator/6/1170/1/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-jenis-kelamin.html>.

Komnas Perempuan. (2020, Mei 1). Siaran Pers Peringatan Hari Buruh Internasional 2020 (Jakarta, 1 Mei 2020). *komnasperempuan.go.id*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-peringatan-hari-buruh-internasional-2020-jakarta-1-mei-2020>.

Nurhadi, M. (2020, Mei 20). Curhat Buruh Gendong Jogja, Bawa Barang 50 Kg Hanya Dibayar Rp 5 Ribu. *jogja.suara.com*. <https://jogja.suara.com/read/2020/05/20/171500/curhat-buruh-gendong-jogja-bawa-barang-50-kg-hanya-dibayar-rp-5-ribu?page=all>.

Wancoko, I. (2021). Perjuangkan Pula Toilet Gratis buat Para Buruh Gendong Perempuan. *Jawa Pos*. <https://www.jawapos.com/features/20/07/2021/perjuangkan-pula-toilet-gratis-buat-para-buruh-gendong-perempuan/>.